

BAB I PENDAHULUAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur sebagai Organisasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai anggaran penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai entitas akuntansi dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; pasal 23 ayat 1: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai **wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang** dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;
- m. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;
- n. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;
- o. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;

3. SISTEMATIKA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan sesuai dengan SAP, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala dalam pencapaian Target Kinerja

Bab III Kebijakan Akuntansi

- 3.1 Entitas Pelaporan
- 3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 4.1. Laporan Realisasi Anggaran -LRA SKPD
- 4.2. Laporan Operasional -LO SKPD
- 4.3. Laporan Perubahan Ekuitas -LPE SKPD
- 4.4. Neraca SKPD
- 4.5. Catatan atas Laporan Keuangan -CaLK SKPD

Bab V Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VI Penutup

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD TA.2023.

3.1.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Ikhtisar Pendapatan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2023	%	REALISASI 2022 (AUDITED)
4	PENDAPATAN	620,000,000	313,893,500	50.63	21,376,375
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	620,000,000	313,893,500	50.63	21,376,375
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	620,000,000	313,893,500	50.63	21,376,375
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	20,000,000	47,965,000	239.83	21,376,375
4.1.2.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	20,000,000	47,965,000	239.83	21,376,375
4.1.2.01.11.0001	Retribusi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya	20,000,000	47,965,000	239.83	21,376,375
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	600,000,000	265,928,500	44.32	-
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Gorsir dan/atau Pertokoan	600,000,000	265,928,500	44.32	-
4.1.2.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	600,000,000	265,928,500	44.32	-

3.1.2. Belanja

Realisasi belanja atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Ikhtisar Belanja

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2023	%	REALISASI 2022 (AUDITED)
5	BELANJA DAERAH	2,821,157,212.00	2,631,091,412.00	93.26	3,338,896,826.00
5.1	BELANJA OPERASI	2,778,872,212.00	2,590,786,412.00	93.23	3,338,896,826.00
5.1.1	Belanja Pegawai	1,803,521,645.00	1,645,893,547.00	91.26	1,706,712,933.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	925,350,567.00	894,892,865.00	96.71	1,486,633,893.00
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	95,550,000.00
5.1.5	Belanja hibah	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	50,000,000.00
5.2	BELANJA MODAL	42,285,000.00	40,305,000.00	95.32	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,285,000.00	40,305,000.00	95.32	-

Realisasi belanja atas program dan kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 3.1.3. Realisasi program kegiatan:

KODE PROG / KEG	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%	SISA ANGGARAN (RP)
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,386,017,147	2,211,519,697	92.69	172,434,330
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67,726,080	67,335,100	99.21	341,300
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43,237,500	42,896,200	99.21	341,300
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,989,620	6,963,400	99.62	26,220
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,759,280	9,747,000	99.87	12,280
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,739,680	7,728,500	99.86	11,180
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,816,521,565	1,658,793,047	91.32	157,728,518
01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1,755,621,645	1,597,993,547	91.02	157,628,098
01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keu SKPD	45,900,000	45,900,000	100.00	-
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14,999,920	14,899,500	99.33	100,420
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9,999,660	9,979,600	99.80	20,060
3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9,999,660	9,979,600	99.80	20,060
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21,979,830	21,966,450	99.94	13,380
3.30.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7,499,830	7,486,450	99.82	13,380
3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14,480,000	14,480,000	100.00	-
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188,663,484	186,543,500	98.88	2,119,984
3.30.01.2.06.01	Penyediaan komp instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,993,659	1,719,000	86.22	274,659
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,997,075	19,933,500	99.68	63,575
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,496,050	7,494,000	99.97	2,050
3.30.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	31,996,700	31,986,000	99.97	10,700
3.30.01.2.06.05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	25,000,000	25,000,000	100.00	-
3.30.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	900,000	900,000	100.00	-
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	15,000,000	13,351,000	89.01	1,649,000
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	86,280,000	86,160,000	99.86	120,000
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44,285,000	42,305,000	95.53	1,980,000
3.30.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29,435,000	27,458,000	93.28	1,977,000
3.30.01.2.06.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14,850,000	14,847,000	99.98	3,000
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162,304,000	153,730,500	94.72	8,573,500
3.30.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2,000,000	961,000	48.05	1,039,000
3.30.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32,304,000	31,169,500	96.49	1,134,500
3.30.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	128,000,000	121,600,000	95.00	6,400,000
3.30.01.2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74,537,528	70,866,500	95.07	3,671,028
3.30.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	28,189,178	26,278,000	93.22	1,911,178
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	30,998,350	29,387,500	94.80	1,610,850
3.30.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	15,350,000	15,201,000	99.03	149,000
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	59,249,425	59,014,365	99.60	235,060
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	59,249,425	59,014,365	99.60	235,060
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	59,249,425	59,014,365	99.60	235,060
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	109,021,525	100,503,825	92.19	8,517,700
3.30.04.2.02	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	109,021,525	100,503,825	97.72	8,517,700

3.30.04.2.02.01	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	18,499,720	18,078,700	97.72	421,020
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	17,499,610	14,934,250	85.34	2,565,360
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	73,022,195	67,490,875	92.43	5,531,320
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	79,999,410	78,293,500	97.87	1,705,910
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang dan Pengawasan	79,999,410	78,293,500	97.55	1,705,910
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang	69,674,410	67,968,500	97.55	1,705,910
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	10,325,000	10,325,000	100.00	-
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	24,516,705	24,512,525	99.98	4,180
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	24,516,705	24,512,525	99.98	4,180
3.30.07.2.01.03	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	24,516,705	24,512,525	99.98	4,180
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	162,353,000	157,247,500	96.86	5,105,500
3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	162,353,000	157,247,500	97.51	5,105,500
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	102,352,925	97,247,525	95.01	5,105,400
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	60,000,075	59,999,975	100.00	100
	JUMLAH	2,821,157,212	2,631,091,412	93.26	188,002,680

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Realisasi anggaran pendapatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu hanya 50,63%, disebabkan oleh kurangnya tenaga penagih retribusi khususnya retribusi Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan. Selain itu ketika pengalihan kewenangan pengelolaan pasar daerah dari Badan Pendapatan Daerah kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, tidak disertai dengan pengalihan anggaran belanja dan tenaga penagih retribusi. Sementara itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian kekurangan tenaga organik sebagai akibat dari pemberhentian tenaga kontrak per periode 1 April 2023.

Mengingat terbatasnya anggaran belanja dan tenaga penagih retribusi tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian berusaha untuk mencari model pengelolaan pasar daerah yang dianggap lebih efektif dan efisien dalam kaitan dengan pencapaian target pendapatan, antara lain, salah satunya dengan menjajaki kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan bagi hasil. Proses pembicaraan dengan Pihak Ketiga ini tidak mencapai titik temu karena terkendala belum adanya regulasi yang rigid tentang model pengelolaan pasar daerah, dimana pengelolaannya oleh Pihak Ketiga.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan keterbatasan sumberdaya tersebut, tetap menjalankan tugasnya terkait pengelolaan pasar ini dengan model atau pola yang selama ini dikerjakan oleh Badan Pendapatan Daerah

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) mengenal adanya dua entitas yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur merupakan suatu entitas Akuntansi maka pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan, yang akan disampaikan secara berjenjang kepada Bupati dalam hal ini bagian Keuangan dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dasar akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah dengan Basis Kas atau pengakuan penerimaan dan pengeluaran diakui pada saat terjadi penerimaan atau pengeluaran Kas. Sehingga dasar dalam penyusunan laporan adalah dari Surat Pertanggung jawaban yang telah disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, yang selanjutnya akan difertifikasi oleh PPK SKPD. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut.

4.3.1. Kas

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2023. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang kertas, uang logam dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran/ pemegang kas per tanggal 31 Desember 2023. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

4.3.2. Persediaan

- a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- c) Pengakuan Persediaan
 1. Persediaan diakui :

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
 2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- d) Pengukuran Persediaan
1. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barangbarang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
 2. Persediaan disajikan sebesar :
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
 - d. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
 - 1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
 - 2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan :
 - (a) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - (b) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.3.3. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen.

4.3.4. Aset Tetap

a) Definisi Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
4. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
5. Masa manfaat adalah:
 - (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
6. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
7. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
8. Klasifikasi Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
9. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
10. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak mudah rusak dan dalam kondisi siap pakai.
11. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
12. Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
13. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
14. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
15. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

b) Pengakuan Aset Tetap

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) Berwujud;
 - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (c) Tidak mudah rusak;
 - (d) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (e) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (f) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - (g) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
3. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
4. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
5. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah dikuasai, diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

c) Pengukuran Aset Tetap

- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, serta biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Aset Tetap Lainnya Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

4.3.5. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain;

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjadi patokan pengklasifikasian dan kode belanja pada saldo awal Tahun Anggaran 2023.

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dengan basis Akrua yang disajikan adalah pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penjelasan atas pos-pos Laporan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN - LRA

4.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.313.893.500,00. dari target sebesar Rp.600.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2023	%	REALISASI 2022 (AUDITED)
4	PENDAPATAN	620,000,000	313,893,500	50.63	21,376,375
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	620,000,000	313,893,500	50.63	21,376,375
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	620,000,000	313,893,500	50.63	21,376,375
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	20,000,000	47,965,000	239.83	21,376,375
4.1.2.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	20,000,000	47,965,000	239.83	21,376,375
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	600,000,000	265,928,500	44.32	-
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	600,000,000	265,928,500	44.32	-

Penerimaan dari retribusi pelayanan tera/tera ulang ini diperoleh dari sidang tera/tera ulang UTTP pada lokasi pasar di 2 (dua) kecamatan dan pelayanan di kantor, yang mana sumber pembiayaan pelaksanaannya dari DPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023. Sedangkan tera/tera ulang pompa ukur BBM, tera/tera ulang timbangan elektronik, tera/tera ulang timbangan bukan otomatis, dan tera/tera ulang pertashop, pelaksanaannya berdasarkan permintaan pihak ketiga (pemilik UTTP), baik di Kab. Flores Timur maupun di Kab. Sikka, yang biaya operasional pelaksanaannya disediakan oleh pihak ketiga (pemilik UTTP).

Penerimaan dari retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan diperoleh dari penarikan retribusi harian atas pemakaian fasilitas pasar, dan penarikan retribusi tahunan atas pemakaian fasilitas pasar

4.1.2. Belanja

Realisasi Belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.2.631.091.412,00 atau 93,26% dari anggaran belanja sebesar Rp.2.821.157.212. Rinciannya anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.2 Realisasi Anggaran Belanja

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2023	%	REALISASI 2022 (AUDITED)
5	BELANJA DAERAH	2,821,157,212.00	2,631,091,412.00	93.26	3,338,896,826.00
5.1	BELANJA OPERASI	2,778,872,212.00	2,590,786,412.00	93.23	3,338,896,826.00
5.1.1	Belanja Pegawai	1,803,521,645.00	1,645,893,547.00	91.26	1,706,712,933.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	925,350,567.00	894,892,865.00	96.71	1,486,633,893.00
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	95,550,000.00
5.1.5	Belanja hibah	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	50,000,000.00
5.2	BELANJA MODAL	42,285,000.00	40,305,000.00	95.32	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,285,000.00	40,305,000.00	95.32	-

4.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.2.590.786.412,00 atau 96,10% dari anggaran belanja sebesar Rp.3.474.528.466,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1.2.1 Realisasi Anggaran Belanja Operasi

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2023	%	REALISASI 2021 (AUDITED)
5.1	BELANJA OPERASI	2,778,872,212.00	2,590,786,412.00	93.23	2,930,598,700.00
5.1.1	Belanja Pegawai	1,803,521,645.00	1,645,893,547.00	91.26	1,706,712,933.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	925,350,567.00	894,892,865.00	96.71	1,021,335,767.00
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	95,550,000.00
5.1.5	Belanja Hibah	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	107,000,000.00

4.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.645.893.547,00 atau 91,26% dari anggaran sebesar Rp.1.803.521.645,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1.2.1.1 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2023	%	REALISASI 2022 (AUDITED)
5.1.1	Belanja Pegawai	1,803,521,645.00	1,645,893,547.00	91.26	1,706,712,933.00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1,482,013,300.00	1,346,403,532.00	90.85	1,407,750,324.00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	273,608,345.00	251,590,015.00	91.95	251,562,609.00
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	47,900,000.00	47,900,000.00	100.00	47,400,000.00

4.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.894.892.865,00 atau 96,71% dari anggaran belanja sebesar Rp.925.350.567,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1.2.1.2 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES. 2023	%	REALISASI 2022 (AUDITED)
5,1,2	Belanja Barang dan Jasa	925,350,567.00	894,892,865.00	96.71	1,486,633,893.00
5.1.2.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	214,712,967.00	200,913,365.00	93.57	483,109,233.00
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	270,957,600.00	256,768,500.00	94.76	376,575,560.00
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	22,100,000.00
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	39,407,500.00
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20,350,000.00	20,183,000.00	99.18	27,291,000.00
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	3,000,000.00
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	402,830,000.00	400,528,000.00	99.43	529,650,600.00
5.1.2.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	5,500,000.00

4.1.2.1.3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran belanja sebesar Rp.50.000.000,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1.2.1.3 Realisasi Anggaran Belanja Hibah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2023	%	REALISASI 2022 (AUDITED)
5.1.05	Belanja Hibah	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	50,000,000.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	50,000,000.00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	50,000,000.00

4.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.40.305.000,00 atau 95,32% dari anggaran belanja sebesar Rp.42.285.000,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1.2.2 Realisasi Anggaran Belanja Modal

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2023	%	REALISASI 2021(AUDITED)
5.2	BELANJA MODAL	42,285,000.00	40,305,000.00	95.32	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,285,000.00	40,305,000.00	95.32	-

4.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.40.305.000,00 atau 95,32% dari anggaran belanja sebesar Rp.42.285.000,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1.2.2.1 Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2023	%	REALISASI 2022 (AUDITED)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,285,000.00	40,305,000.00	95.32	-
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19,050,000.00	18,105,000.00	95.04	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	23,235,000.00	22,200,000.00	95.55	-

4.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL – LO

4.2.1 Pendapatan LO

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.313.893.500,00 dan Rp.21.376.375,00 adalah merupakan Pendapatan LO. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.2.1 Pendapatan LO

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2023	%	REALISASI 2022 (AUDITED)
7	PENDAPATAN - LO	620,000,000	313,893,500	50.63	21,376,375
7 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	620,000,000	313,893,500	50.63	21,376,375
7 . 1 . 1.	Pajak Daerah - LO	-	-	-	-
7 . 1 . 2	Retribusi Daerah - LO	620,000,000	313,893,500	50.63	21,376,375

4.2.2 Beban – LO

4.2.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.645.893.547,00 dan tahun 2022 sebesar Rp.1.706.712.933,00 atau mengalami penurunan sebesar 3,56%.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian beban pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sbb:

Tabel 4.2.2.1 Beban Pegawai

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2023	TA 2022 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNA) %
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1,346,403,532.00	1,407,750,324.00	(4.36)
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	251,590,015.00	251,562,609.00	0.01
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - LO	47,900,000.00	47,400,000.00	1.05
Jumlah Beban Pegawai LO	1,645,893,547.00	1,706,712,933.00	(3.56)

4.2.2.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.894.892.865,00 dan tahun 2022 sebesar Rp.1.486.633.893,00 atau mengalami penurunan sebesar 39,80%.

Beban Barang dan Jasa merupakan beban yang mencatat konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, beban yang dipakai untuk memelihara dan mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal, beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan, dan beban atas barang dan jasa BOS.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.2.2 Beban Barang dan Jasa

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2023	TA 2022 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNAN) %
Beban Bahan Pakai Habis	200,913,365.00	483,109,233.00	(58.41)
Beban Jasa Kantor	256,768,500.00	376,575,560.00	(31.81)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4,500,000.00	22,100,000.00	(79.64)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2,000,000.00	39,407,500.00	(94.92)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20,183,000.00	27,291,000.00	(26.05)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	3,000,000.00	(100.00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	400,528,000.00	529,650,600.00	(24.38)
Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10,000,000.00	5,500,000.00	81.82
Jumlah Beban Barang dan Jasa LO	894,892,865.00	1,486,633,893.00	(39.80)

4.2.2.3. Beban Subsidi

Jumlah Beban Subsidi periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp.95.550.000.000,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.2.2.3 Beban Subsidi

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2023	TA 2022 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNAN) %
Beban Subsidi kepada BUMN - LO	-	37,390,000.00	(100.00)
Beban Subsidi kepada Koperasi - LO	-	58,160,000.00	(100.00)
Jumlah Beban Subsidi - LO	-	95,550,000.00	(100.00)

4.2.2.4. Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.50.000.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp.50.000.000,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.2.2.4 Beban Hibah

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2023	TA 2022 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNA) %
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas yang Berbadan Hukum Indonesia - LO	50,000,000.00	50,000,000.00	-
Jumlah Beban Hibah - LO	50,000,000.00	50,000,000.00	-

4.2.2.5. Beban Lain-Lain

Jumlah Beban Lain-Lain periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.14.847.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp.0,00. Beban Lain-Lain adalah beban atas konsumsi barang yang diperoleh dari belanja modal namun tercatat sebagai barang ekstrakomptable

4.2.2.5. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.91.569.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp.185.679.150,00, atau mengalami penurunan sebesar 50,68%. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.2.2.5 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2023	TA 2022 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNA) %
Beban Penyusutan Alat Angkutan - LO	83,034,900.00	81,927,400.00	1.35
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur - LO	1,772,500.00	86,158,500.00	(97.94)
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	2,321,600.00	14,309,000.00	(83.78)
Beban Penyusutan Komputer - LO	4,440,000.00	3,284,250.00	35.19
Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin LO	91,569,000.00	185,679,150.00	(50.68)

4.2.2.6. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.513.308.711,68 dan tahun 2022 sebesar Rp.378.033.497,68, atau mengalami kenaikan sebesar 35,78%. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.2.2.5 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2023	TA 2022 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNA) %
Beban Penyusutan Bangunan Gedung - LO	513,308,711.68	378,033,497.68	35.78
Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	513,308,711.68	378,033,497.68	35.78

4.2.2.7. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.93.470.011,17 dan tahun 2022 sebesar Rp.110.498.142,67, atau mengalami penurunan sebesar 15,41%. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.2.2.5 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2023	TA 2022 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNA) %
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan - LO	72,143,504.50	83,692,381.00	(13.80)
Beban Penyusutan Bangunan Air - LO	6,346,506.67	11,825,761.67	(46.33)
Beban Penyusutan Instalasi - LO	9,630,000.00	9,630,000.00	-
Beban Penyusutan Jaringan - LO	5,350,000.00	5,350,000.00	-
Jumlah Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan LO	93,470,011.17	110,498,142.67	(15.41)

4.2.4. Surplus / Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.(2.990.087.634,85) dan Rp.(3.991.731.241,35) atau mengalami penurunan sebesar 25,10%. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

4.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.3.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing masing sebesar Rp.16.754.091.358,75 dan Rp.17.428.302.149,10

4.3.2 .Surplus / Defisit LO

Jumlah Surplus / Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.(2.990.087.634,85) dan Rp.(3.991.731.241,35). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

4.3.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak kumulatif perubahan kebijakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.5.950.268.486,33 dan Rp.0,00.

4.3.3.1 .Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

4.3.3.2 . Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih revaluasi aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

4.3.3.3.Koreksi Ekuitas

Koreksi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.5.950.268.486,33 dan Rp.0,00.

4.3.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Jumlah kewajiban untuk dikonsolidasikan untuk 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.317.197.912,00 dan tahun 2022 sebesar Rp.3.317.520.451,00

4.3.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.20.031.470.122,23 dan Rp.16.754.091.358,75

4.4 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

4.4.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau per tanggal neraca.

4.4.2 Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,00

Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.4.3. Persediaan Rp 5.841.000,00

Merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp.5.841.000,00 dan Rp.0,00

4.4.4. Tanah Rp 1.357.145.000,00

Nilai aset tetap Tanah yang dimiliki SKPD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.1.357.145.000,00 dan Rp.3.600.000,00. Nilai aset tetap Tanah berasal dari pembelian tanah di Tahun 2018 dan pindah antar entitas di tahun 2023 dengan dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.4.4 Aset Tetap Tanah

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2023 (UNAUDITED)	SALDO 2022 (AUDITED)	KENAIKAN / PENURUNAN	TREND (%)
1.3.01	TANAH				
1.3.01.01	Tanah Persil				
1.3.01.01.002	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1,321,847,000.00	0.00	1,321,847,000.00	#DIV/0!
1.3.01.01.004	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	35.298.000.00	3,600,000.00	31.698.000.00	880.50
	JUMLAH	1,357,145,000.00	3,600,000.00	1,353,545,000.00	37,598.47

Mutasi nilai aset tetap Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

TANAH	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	3,600,000		
REALISASI BELANJA MODAL/PEMBELIAN	-		
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Extrakompatabel	-	-	-
Pindah antar Aset	-	-	-
Pindah antar Entitas	3,357,145,000	3,600,000	3,353,545,000
Hibah	-	-	-
Hasil Sensus	-	-	-
Tindak Lanjut LHP	-	-	-
Reklas dari Extrakompatabel	-	-	-
Reklas ke Aset Lain-Lain	-	-	-
Persediaan	-	-	-
JUMLAH	3,357,145,000	3,600,000	3,353,545,000
MUTASI +/-	3,353,545,000		
SALDO AKHIR	3,357,145,000		

Berdasarkan KIB A, saldo aset tetap Tanah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.357.145.000,00. Penambahan aset tanah ini diperoleh dari mutasi pindah antar entitas antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur.

4.4.5. Peralatan dan Mesin

Rp 2.099.578.150,00

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.2.099.578.150,00 dan Rp.2.082.420.150,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.4.5 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2023 (UNAUDITED)	SALDO 2022 (AUDITED)	KENAIKAN / PENURUNAN	TREND (%)
1.3.02.02	ALAT-ALAT ANGKUTAN				
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1,093,848,000.00	1,093,848,000.00	-	-
1.3.02.03	ALAT BENGKEL DAN UKUR				
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	17,725,000.00	17,725,000.00	-	-
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	62,725,000.00	62,725,000.00	-	-
1.3.02.03.03	Alat Ukur	490,030,000.00	490,030,000.00	-	-
1.3.02.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
1.3.02.05.13	Alat Kantor	100,811,220.00	109,553,220.00	(8,742,000)	(7.98)
1.3.02.05.14	Alat Rumah Tangga	151,503,930.00	147,803,930.00	3,700,000	2.50
1.3.02.05.16	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12,200,000.00	12,200,000.00	-	-
1.3.02.10	KOMPUTER				
1.3.02.10.01	Komputer Unit	142,145,000.00	121,745,000.00	20,400,000	16.76
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	28,590,000.00	26,790,000.00	1,800,000	6.72
	JUMLAH	2,099,578,150.00	2,082,420,150.00	17,158,000	0.82

Mutasi nilai aset tetap Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERALATAN DAN MESIN	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	2.082,420,150		
REALISASI BELANJA MODAL/PEMBELIAN	40,305,000		
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Extrakompatabel	-	14,847,000	(14,847,000)
Pindah antar Aset	-	-	-
Pindah antar Entitas	3,700,000	12,000,000	(8,300,000)
Hibah	-	-	-
Hasil Sensus	-	-	-
Tindak Lanjut LHP	-	-	-
Reklas dari Extrakompatabel	-	-	-
Reklas ke Aset Lain-Lain	-	-	-
Persediaan	-	-	-
JUMLAH	3,700,000	26,847,000	(23,147,000)
MUTASI +/-	17,158,000		
SALDO AKHIR	2,099,578,150		

Saldo akhir aset tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.099.578.150,00. Mengalami mutasi bertambah sebesar Rp.17.158.000,00 atau 0.82%

4.4.6. Gedung dan Bangunan

Rp 25.665.435.584,00

Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.25.665.435.584,00 dan Rp.18.901.674.884,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.4.6 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2023 (UNAUDITED)	SALDO 2022 (AUDITED)	KENAIKAN / PENURUNAN	TREND
1.3.03	BANGUNAN GEDUNG				
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja				
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	218,456,000.00	1,103,718,000.00	(885,262,000)	(80.21)
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar	25,035,817,584.00	17,337,094,884.00	7,698,722,700	44.41
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Garasi/Pool	162,355,000.00	69,525,000.00	92,830,000	133.52
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Terbuka	49,973,000.00	-	49,973,000	#DIV/0!
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	198,825,000.00	391,337,000.00	(192,512,000)	(49.19)
	JUMLAH	25,665,426,584.00	18,901,674,884.00	6,763,751,700	35.78

Mutasi nilai aset tetap Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERALATAN DAN MESIN	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	18,901,674,884		
REALISASI BELANJA MODAL/PEMBELIAN	-		
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Extrakompatabel	-	-	-
Pindah antar Aset	-	-	-
Pindah antar Entitas	8,129,515,700	1,365,755,000	6,763,760,700
Hibah	-	-	-
Hasil Sensus	-	-	-
Tindak Lanjut LHP	-	-	-
Reklas dari Extrakompatabel	-	-	-
Reklas ke Aset Lain-Lain	-	-	-
Persediaan	-	-	-
JUMLAH	8,129,515,700	1,365,755,000	6,763,760,700
MUTASI +/-	6,763,760,700		
SALDO AKHIR	25,665,435,584		

Saldo akhir aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp.25.665.435.544,00. Mengalami mutasi bertambah sebesar Rp.6.763.760.700,00 yang merupakan mutasi pindah antar entitas antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur

4.4.7. Jalan Irigasi dan Jaringan

Rp 1.479.096.660,00

Nilai aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp.1.436.219.010,00 dan Rp.1.479.096.660,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.4.7 Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2023 (UNAUDITED)	SALDO 2022 (AUDITED)	KENAIKAN / PENURUNAN	TREND (5)
1.3.04	JALAN DAN JEMBATAN				
1.3.04.01.01..0009	Jalan Khusus	836,923,810.00	836,923,810.00	-	-
1.3.04.02.04..0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	81,000,000.00	81,000,000.00	-	-
1.3.04.02.06..0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	68,895,200.00	111,772,850.00	(42,877,650.00)	(38.4)
1.3.04.03.05..0009	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	288,900,000.00	288,900,000.00	-	-
1.3.04.04.02..0002	Jaringan Distribusi	160,500,000.00	160,500,000.00	-	-
	JUMLAH	1,436,219,010.00	1,479,096,660.00	(42,877,650.00)	(2.90)

Mutasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut :

PERALATAN DAN MESIN	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	1,479,096,660		
REALISASI BELANJA MODAL/PEMBELIAN	-		
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Extrakompatabel	-	-	-
Pindah antar Aset	-	-	-
Pindah antar Entitas	-	42,877,650	(42,877,650)
Hibah	-	-	-
Hasil Sensus	-	-	-
Tindak Lanjut LHP	-	-	-
Reklas dari Extrakompatabel	-	-	-
Reklas ke Aset Lain-Lain	-	-	-
Persediaan	-	-	-
JUMLAH	-	42,877,650	(42,877,650)
MUTASI +/-	(42,877,650)		
SALDO AKHIR	1,436,219,010		

Saldo akhir aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.436.219.010,00. Mengalami mutasi berkurang sebesar Rp.42.877.650,00 yang merupakan mutasi pindah antar entitas antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur

4.4.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Rp (8.526.907.621,77)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp.(8.526.907.621,77) dan Rp.(5.712.700.335,25) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra Aset Tetap yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap.

4.4.9. Aset Lain-Lain

Rp 921.881.791,00

Nilai Aset Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp.921.881.791,00 dan Rp.940.581.631,00, Aset Lain-Lain ini merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan/atau tidak lagi dipergunakan untuk operasional kantor tetapi belum diusulkan pemutihan/penghapusan sehingga dilakukan reklasifikasi.

Rinciannya adalah reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp.719.248.550, reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.175.807.251, dan reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.26.825.990

4.4.10. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Rp (921.881.791,00)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp.(921.881.791,00) dan Rp.(921.881.791,00) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain merupakan kontra Aset Lain-Lain yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-Lain.

4.4.11. Kewajiban

0,00

Kewajiban untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan 0,00. Kewajiban adalah utang entitas kepada pihak ketiga baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

4.4.12. Ekuitas

Rp 22.031.470.122,23

Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.22.031.470.122,23 dan Rp.16.754.091.358,75, mengalami kenaikan sebesar Rp.5.277.378,763,48. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

4.4.12. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Rp 22.031.470.122,23

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.22.031.470.122,23 dan Rp.16.754.091.358,75, mengalami kenaikan sebesar Rp.5.277.378,763,48.

4.5 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

BAB V INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di:

□ Jalan : Ile Boleng
□ Nomor : -
□ Telepon : (0383) 21271
□ Fax. : (0383) 21271

Dasar pembentukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur berdasarkan Perda Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur di pimpin oleh Siprianus Sina Ritan, S.Sos.M.Si sesuai Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKPP.821.01/02/PKM/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan Tahun Anggaran 2023, SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga tenaga Non PNS yang terdidik dan terampil, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Pegawai Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JENJANG PENDIDIKAN						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	II					-	1	1
2	III	-	-	-	-	3	-	3
3	IV V Analisis Kebijakan			1	1	4		6
4	Non Eselon	-	-	3	2	4	-	9
	Jumlah PNS/ASN	-	-	4	3	11	1	19
5	Honorir	1	1	3	1	-		6
	Total Pegawai	1	1	7	4	11	1	25

Tabel 5.2 Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN					Honorir
		I	II	III	IV	Jumlah ASN	
1	S2	-			1	1	-
2	S1	-	-	10	1	11	-
3	Diploma	-	-	3	-	3	1
4	SMA	-	1	3	-	4	3
5	SMP	-	-	-	-	-	1
6	SD	-				-	1
	Jumlah PNS	-	1	16	2	19	-
	Honorir						6
	Total Pegawai	-	1	16	2	19	25

Tabel 5.3 Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JENJANG PENDIDIKAN						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Laki Laki	-	-	1	2	5	1	9
2	Perempuan	-	-	3	1	6		10
	Jumlah PNS	-	-	4	3	11	1	19
3	Honorer Laki Laki	1	1	3	1	-		6
4	Honorer Perempuan			-	-	-		-
	Honorer	1	1	3	1	-	-	6
	Total Pegawai	1	1	7	4	11	1	25

BAB VI PENUTUP

Dari Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023, dapat disimpulkan bahwa rencana-rencana strategis yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Program dan Kegiatan yang mendukung upaya pelayanan publik terus dilakukan, antara lain melalui program urusan perdagangan dan urusan perindustrian.

Pertukaran gedung tempat kerja antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur menyebabkan banyak terjadi mutasi aset antar entitas. Mutasi aset antar entitas ini juga terjadi dengan Badan Pendapatan Daerah sebagai akibat pengalihan kewenangan pengelolaan pasar.

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan meningkatkan transparansi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku dalam penyampaian laporan keuangan.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan sesuai dengan kondisi objektif, dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan di periode berikutnya.

Larantuka, 10 Februari 2024

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Flores Timur,

Siprianus Sina Ritan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701231 199903 1 056